

AIK DARI CIRI KHAS KE ASAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH: PROPOSAL UNTUK MERUMUSKAN SISTEM PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Asep Purnama Bahtiar¹

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹asepdalem69@gmail.com

Abstrak

Keywords:
*Al-Islam dan
Kemuhammadiyah
n (AIK);
Sispenmuh;
Kurikulum*

Bagi Muhammadiyah kemendesakan dan kepentingan memiliki sistem pendidikan adalah juga untuk memperkuat status AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyah) di PTMA. Sudah jadi rahasia umum kalau AIK itu sebagai komplemen. Konsekuensinya AIK menjadi mata kuliah subordinat dari kurikulum di PTMA. Karena sebagai suplemen kerap kali AIK ini dianggap formalitas belaka atau proforma. Pasca satu abad pendidikan Muhammadiyah AIK sudah tidak lagi cukup hanya sebagai “ciri khas” tanpa penjelasan status yang memadai. Dari status “ciri khas” AIK harus menjadi asas dan jiwa pendidikan Muhammadiyah. Dalam konteks inilah pentingnya rumusan Sistem Pendidikan Muhammadiyah (Sispenmuh) yang menempatkan AIK sebagai jiwa atau ruh pendidikan Muhammadiyah. Meskipun dari segi istilah AIK itu sendiri masih mengesankan dikotomi antara al-Islam (sebagai agama Islam dan/atau pendidikan Islam) dengan Kemuhammadiyah (hal-ihwal yang berkaitan dengan Persyarikatan Muhammadiyah). Dalam konteks ini formulasi iman dan kemajuan menjadi prinsip dasar filsafat pendidikan Muhammadiyah dan landasan penyusunan kurikulum pendidikan Muhammadiyah untuk menghilangkan dikotomi sebagai salah satu problematika yang mendasar. Selama ini kesan dikotomi tersebut masih kentara, misalnya dengan pemilahan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama atau dengan penempatan AIK sebagai mata kuliah semata yang disebut “ciri khas” itu. Bahkan dalam nomenklatur AIK itu sendiri terkandung dikotomi antara al-Islam di satu sisi dan Kemuhammadiyah di sisi lain. Desain Sispenmuh ini merefleksikan latar historis didirikannya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah; visi dan ide pembaruan yang dipancarkan KH. Ahmad Dahlan; dinamika perguruan Muhammadiyah dan konteks sekarang yang melingkupinya; serta orientasi ke depan di tengah perubahan dunia yang tidak mudah untuk diperkirakan. Di sisi lain, Sispenmuh juga bisa memberikan gambaran dan arah berupa basis nilai dan idealisme pembaruan ke arah kemampuan untuk mendesain pendidikan yang sistemik dan paradigmatis guna pemekaran seluruh potensi warga didik dan pencapaian kemajuan dari zaman ke zaman untuk kebajikan publik sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Perbincangan tentang topik Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Karena itu mau tidak mau kita harus merujuk catatan atau dokumen lama yang sudah membahas atau menyinggung topik tersebut, baik dalam fora seminar maupun institusi permusyawaratan Muhammadiyah. Dalam hal ini, penulis juga mencoba mengacu pada catatan dan dokumen tersebut dengan tetap mengikuti alur informasi mutakhir

yang relevan guna memberikan perspektif baru yang bisa ditawarkan untuk penguatan AIK dan penyusunan Sistem Pendidikan Muhammadiyah (Sispenmuh).

Sekitar tahun 1988 dalam ceramah subuh di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. HA Mukti Ali pernah mengatakan, kalau kita mau sebentar merenungkan tentang cita-cita Muhammadiyah yang diletakkan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, maka orang dapat menyimpulkan cita-cita perjuangan itu dalam hal-hal berikut ini. *Pertama*, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam. *Kedua*, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. *Ketiga*, reformasi ajaran-ajaran dan pendidikan Islam. *Keempat*, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan-serangan dari luar, *Kelima*, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan.¹

Lima poin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. A. Mukti Ali tadi secara eksplisit telah menunjukkan komitmen kebangsaan yang tidak lepas dari komitmen keagamaan dalam perspektif paham agama menurut Muhammadiyah. Sesuai dengan topik makalah ini maka poin kedua dan ketiga memiliki relevansi yang penting untuk dielaborasi lebih lanjut, terutama ketika praktik pendidikan di perguruan Muhammadiyah masih membutuhkan penataan dan pembenahan sistemik di sana-sini serta peningkatannya secara substantif dan kualitatif.

Dalam skala yang lebih luas, umpamanya ditinjau dari perspektif sejarah, pendidikan Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme-imperialisme Belanda dan Jepang pada awal abad ke-20. Tokoh-tokoh terkemuka dan para perintis pendidikan di Indonesia, di antaranya seperti R.A. Kartini, R. Dewi Sartika, K.H. Ahmad Dahlan, Ki Hadjar Dewantara, dan Engku Moh. Sjafei, memiliki visi dan misi pendidikan dalam bingkai kebangunan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan kebebasan. Mereka telah mentransfer ilmu pengetahuan dan menginternalisasikan rasa percaya diri kepada para pelajar agar berdaya kemajuan dan berjiwa merdeka.

Bisa dibayangkan pada zaman itu penyelenggaraan pendidikan yang bersahaja--sedikit-banyak mesti mempertimbangkan atau membandingkan dengan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda--belum berada dalam bingkai sistem pendidikan yang bersifat nasional asli kaum boemi poetra. Masing-masing berlangsung sesuai dengan gagasan tokoh-tokohnya di atas.² Pun demikian dengan Muhammadiyah yang sudah memiliki banyak sekolah di zaman Hindia Belanda itu, yang disebut MT Arifin sebagai sisi lain pendidikan Muhammadiyah yang menarik berupa kemampuan sistemnya yang memberikan keseimbangan dengan pengetahuan praktis seperti pendidikan spiritual, kepribadian, dan nasionalisme yang berkembang secara kultural.³

BERKEMBANG MESKI MINUS SISTEM

Bila dihitung dari awal mula Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan secara resmi, paling tidak sejak 1918, berarti sampai sekarang sudah satu abad Muhammadiyah bergerak dan bergelut di dunia pendidikan. Dalam rentang waktu seratus tahun itu lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah sudah tersebar dan berkembang mulai dari Sabang sampai Merauke dalam jumlah ribuan sekolah dasar dan menengah, ratusan pondok pesantren, dan lebih dari seratus perguruan tinggi sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK/TPQ	4.623
2	SD/MI	2.252
3	SMP/MTs	1.111
4	SMA/SMK/MA	1.291

¹A. Mukti Ali, 1991, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, hlm. 143.

²Mengenai gagasan para tokoh pendidikan di awal-awal kebangunan Indonesia, misalnya Ki Hajar Dewantara dan Engku Muh, Sjafei bisa dibaca pada H.A.R. Tilaar, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hlm. 321-335. Khusus tentang Ki Hajar Dewantara gagasan-gagasannya bisa dibaca pada bukunya *Pendidikan*, 2004, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

³MT Arifin, 1990, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, diterbitkan ulang oleh Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016, hlm. 83.

5	Pondok Pesantren	67
6	Perguruan Tinggi	171

Sumber: <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-8-det-amal-usaha.html>

Dengan jumlah ribuan lembaga pendidikan itu tidak bisa dimungkiri bahwa terjadi perkembangan perguruan Muhammadiyah yang luar biasa. Paling tidak secara kuantitatif Muhammadiyah *leading* di bidang pendidikan di tanah air ini. Dari segi kualitas terdapat perbedaan dan ketidakmerataan juga disadari masih banyak yang harus dibenahi dan ditata ulang dalam berbagai dimensinya.

Pertanyaannya kemudian, mengapa setelah sekian lama berkiprah di dunia pendidikan itu Muhammadiyah belum memiliki sistem pendidikan sendiri?⁴ Pertanyaan tersebut menunjukkan keprihatinan dan menyiratkan kegelisahan yang mendalam terhadap, katakanlah, praktek pendidikan di perguruan Muhammadiyah mulai dari SD sampai perguruan tinggi yang belum juga mempunyai desain besar mengenai pendidikan yang diidealkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah berupa sistem pendidikan sendiri. Karena bagaimanapun semua jenis dan jenjang perguruan Muhammadiyah itu adalah bagian atau subsistem dari Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam bahasa yang lebih tegas Sahlan Rosyidi mengatakan, lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai SD sampai perguruan tinggi merupakan subsistem dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dengan demikian, kedudukan dan fungsi PTM adalah sebagai mekanisme dari Persyarikatan yang ditugaskan melakukan dakwah lewat pentunasan cendekiawan Muslim, dalam hal ini ialah mahasiswa dari PTM.⁵

Apa yang dikemukakan oleh Sahlan Rosyidi itu merupakan idealisme pendidikan Muhammadiyah--yang harus bisa merefleksikan watak gerakan dan alam pikiran Persyarikatan yang memayunginya—karena dalam kenyataannya masih mengidap berbagai persoalan yang tidak ringan. Menurut Said Tuhuleley, paling tidak ada tiga problematika penting yang mendalam dan substansial tentang pendidikan Muhammadiyah. *Pertama*, problematika pengembangan ilmu pengetahuan yang belum jelas konsep paradigmatisnya sehingga masih mencuatkan dikotomi. *Kedua*, problematika kultural yang terkait dengan pandangan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah. *Ketiga*, problematika individual menyangkut kualitas para pengelolanya.⁶

Tiga problematika tersebut ditambah dengan pertanyaan besar di atas tadi sesungguhnya bertalian dengan persoalan tentang sistem, yakni Sistem Pendidikan Muhammadiyah (Sispenmuh). Bisa dikatakan selama satu abad ini pendidikan Muhammadiyah yang sudah berkembang sedemikian rupa itu berlangsung tanpa sistem atau penyelenggaraannya minus sistem. Di dalam Sistem Pendidikan Muhammadiyah antara lain termuat rumusan falsafah pendidikan Muhammadiyah dan kurikulumnya, pijakan dasar, dan arah capaian penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah.

Sistem Pendidikan Muhammadiyah ini dipandang mendasar karena menjadi acuan regulatif dan panduan sistemik bagi penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yang membedakannya dengan sekolah dan perguruan tinggi lain, baik dari segi konseptual maupun aspek penyelenggarannya. Di samping ciri khas itu, kepentingan dari sistem tersebut adalah juga guna menggambarkan posisi pendidikan Muhammadiyah di tengah zamannya, paling tidak yang akan selalu berinteraksi dengan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi, yang mesti disikapi dan direspons oleh pendidikan Muhammadiyah.

Kesadaran seperti itu penting karena pendidikan dengan sistem dan perangkat-perangkat organik lainnya tidak berada di ruang vakum dan area hampa. Sekolah dan kampus perguruan tinggi misalnya harus hadir dalam dinamika sekitarnya secara proaktif dan memberikan respons yang

⁴Bandingkan dengan pendidikan yang dikelola oleh negara yang sudah memiliki "Sistem Pendidikan Nasional", misalnya yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989; dan kemudian diganti dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

⁵Sahlan Rosyidi, "Ulama, Tajih, Pendidikan Ulama, Pendidikan Islam" dalam Nurhadiantomo, Harsono, dan M. Thoyibi (Peny.), 1989, *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.155.

⁶Said Tuhuleley (Editor), 2003, Pengantar dalam *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah: Suatu Keniscayaan*, Yogyakarta: Pustaka SM, hlm. xiv-xviii.

produktif. Inilah yang disebut oleh Mochtar Buchori sebagai “sistem pendidikan yang sehat”.⁷ Lebih lanjut menurut mantan Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta ini, Setiap sistem pendidikan yang sehat selalu berusaha memahami zamannya dan berusaha pula memenuhi tuntutan-tuntutannya. Setiap sistem pendidikan yang dewasa selalu berusaha mempersiapkan masyarakat yang dilayaninya dalam mengembangkan wawasan-wawasan baru untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan yang tampak akan datang.⁸

AIK SEBAGAI CIRI KHAS?

Bagi Muhammadiyah kemendesakan dan kepentingan memiliki sistem pendidikan tersebut adalah juga untuk memperkuat status AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyah) di PTM.⁹ Mengapa harus diperkuat? Karena sudah jadi rahasia umum kalau AIK itu sebagai komplemen atau suplemen. Konsekuensinya AIK menjadi matakuliah subordinat dari kurikulum di PTM. Karena sebagai suplemen atau komplemen kerap kali AIK ini dianggap formalitas belaka atau proforma. Tertulis dalam peraturan dan norma dengan sebutan AIK sebagai “ciri khas”, hemat penulis nomenklatur tersebut menyisakan banyak tanya. Misalnya, “PTM wajib memiliki *ciri khas* kurikulum al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.”¹⁰

Setelah ditelusuri di dalam ketentuan tersebut ternyata juga tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “ciri khas” itu. Di dalam Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terdiri dari 12 Bab dan 17 Pasal itu tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang kurikulum dan AIK sebagai ciri khas PTM. Hal ini mirip juga dengan penyebutan sistem pendidikan Muhammadiyah dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah,¹¹ namun hingga sekarang tidak ada konsep dan dokumennya.

Padahal Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang (2005) dan ke-46 di Yogyakarta (2010) telah mengamanatkan hal tersebut. Dalam garis besar program nasional bidang pendidikan, iptek, dan litbang disebutkan: “Membangun cetak biru (*blue print*) pendidikan Muhammadiyah untuk menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama ini dan sebagai langkah antisipasi bagi masa depan pendidikan yang lebih kompleks.”¹² Kemudian pada rincian program bidang ini ditegaskan “Mengupayakan sistem pendidikan Muhammadiyah yang berkualitas dengan berbasis Al-Qur’an dan As-Sunnah.”¹³ Terkait amanah muktamar ini semestinya Majelis Pendidikan Tinggi dan Majelis Pendidikan Dasar Menengah yang wajib menindaklanjutinya atau menjadi *leading sector* dalam perumusan Sistem Pendidikan Muhammadiyah.

Beririsan dengan Sispenmuh yang masih absen, maka tidak berlebihan jika selama ini AIK sebagai “ciri khas” dianggap sekedar “pembeda” dengan perguruan atau lembaga pendidikan lain dengan adanya matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dengan kata lain AIK ditempatkan sebagai ornamen untuk menunjukkan nomenklatur mata pelajaran atau mata kuliah dengan jumlah SKS tertentu. Mata kuliah AIK di masing-masing PTM berbeda pembobotan jumlah SKS-nya, ada yang 6 SKS, 8 SKS, atau 10 SKS. Begitu pula dengan pola dan pengayaannya.

Umpamanya kita ambil yang 6 SKS, berarti mata kuliah AIK itu hanya sepersekian persen dari sekitar 150-160 SKS Program S1. Dengan persentase yang sangat sedikit itu juga menunjukkan

⁷Mochtar Buchori, 2001, *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 25.

⁸*Ibid.*

⁹Di tingkat pendidikan dasar dan menengah disebut Ismuba (Al-Islam, Kemuhammadiyah, dan Bahasa Arab)

¹⁰Lihat Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bab VI Pasal 9 Ayat 2.

¹¹“Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing PTM dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan *sistem pendidikan Muhammadiyah*” (Bab VI Pasal 9 Ayat 1). Cetak tebal dan miring dari penulis.

¹²PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 Tahun 2005, hlm. 62. Dalam *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 Tahun 2010, hlm. 82 juga dimuat rumusan yang sama.

¹³*Ibid.*

kedudukan mata kuliah AIK tidak jauh berbeda dengan mata kuliah-mata kuliah lainnya, bahkan mungkin dianggap bukan sebagai mata kuliah yang penting dan inti. Dengan begitu, sebutan “ciri khas” pada AIK itu baru sampai di situ saja.

Sudah waktunya sekarang, bahkan sebenarnya sudah terlambat, AIK tidak lagi cukup hanya sebagai “ciri khas” tanpa penjelasan status yang memadai. Dari status “ciri khas” AIK harus menjadi asas dan jiwa pendidikan Muhammadiyah. Dalam konteks inilah pentingnya rumusan sistem pendidikan Muhammadiyah yang menempatkan AIK sebagai jiwa atau ruh pendidikan Muhammadiyah. Meskipun dari segi istilah AIK itu sendiri masih mengesankan dikotomi antara al-Islam (sebagai agama Islam dan/atau pendidikan Islam) dengan Kemuhammadiyah (hal-ihwal yang berkaitan dengan Persyarikatan Muhammadiyah dari dimensi historis, ideologis, dan organisatoris).

Lepas dari sebutan ciri khas seperti itu ada hal yang menarik, misalnya di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, AIK didesain dalam pola yang beragam. Sebagaimana diungkapkan oleh MT Arifin, pada dekade '80-an pendidikan AIK sudah diselenggarakan secara *kurikuler* (kegiatan di kampus yang sesuai dengan unsur-unsur kurikulum); *kokurikuler* (kegiatan yang tidak berdasarkan unsur-unsur kurikulum namun masih memiliki hubungan yang erat sebagai pendukung); dan *ekstrakurikuler* (kegiatan AIK yang berada di luar kurikulum).¹⁴

Sebetulnya sejak tahun '60-an Muhammadiyah sudah memberikan perhatian yang serius terhadap problematika tersebut. Tahun 1965 Muhammadiyah merumuskan “Panca Program Pendidikan” yang mencakup: peningkatan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah; melaksanakan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung pada 1965; menerapkan bentuk sekolah teladan; mengikutsertakan partisipasi anggota Muhammadiyah; memajukan dan membimbing budaya Islam.¹⁵

Program yang pertama tadi, “peningkatan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah”, penting untuk dielaborasi lebih jauh kendati rumusan lanjutannya yang utuh dan lengkap tidak diketahui apakah ada sudah disusun atau tidak ada karena belum dirumuskan. Dari tahun 1965 itu baru pada tahun 1974 (Muktamar Muhammadiyah ke-39 di Padang) terdapat rumusan “mata pelajaran Kemuhammadiyah diwajibkan sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi”.¹⁶ Kemudian pada tahun 1978 sebagai hasil Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya ada keputusan yang menyangkut AIK ini dalam dua poin: (1). Semua pelajaran di semua tingkatan pendidikan harus dijiwai dengan ajaran Islam. (2). Pendidikan dan pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada sekolah-sekolah umum dan kejuruan yang telah berjalan selama ini agar ditingkatkan dan disempurnakan.¹⁷

USULAN SISTEM PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Bila dalam hal kurikulum AIK itu menjadi bagian atau sub, maka dalam status PTM sebagai AUM dinyatakan sebagai jiwa dan landasan. “Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang *dijiwai dan dilandasi* nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.”¹⁸

Hemat penulis inilah antara lain yang bisa menjadi peluang pijakan bagi kita untuk merumuskan Sistem Pendidikan Muhammadiyah sehingga AIK bukan lagi sebagai ciri khas, tetapi

¹⁴MT Arifin, 1990, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, diterbitkan ulang oleh Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016, hlm. 385. Informasi menarik ini bersumber pada “Laporan Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Ko-Ekstra Kurikuler (1984-185)” oleh Rektor UMS Mohammad Djazman. Informasi mutakhir, beberapa tahun terakhir ini kegiatan AIK di UMS juga ada yang didesain dalam bentuk Baitul Arqam (perkaderan resmi di Muhammadiyah) bagi mahasiswa baru.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 308

¹⁶Umar Hasyim, 1990, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, dan Pendidikan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 265.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 148.

¹⁸PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 04 Tahun 2012, hlm. 123.

bisa diposisikan sebagai asas, jiwa atau ruhnya PTM. Mukhtar ke-46 (2010) dan ke-47 (2015) telah memberikan penekanan lagi mengenai posisi AIK bagi perumusan Sispemuh: “Mengembangkan sistem pendidikan Muhammadiyah yang holistik atau menyeluruh sebagai kelanjutan dari konsep *blueprint* pendidikan Muhammadiyah yang unggul/utama di masa depan.”¹⁹ “Berkembangnya fungsi pendidikan tinggi Muhammadiyah yang berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah, holistik integratif, bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan.”²⁰

Seperti sudah disinggung di depan, keberadaan Sistem Pendidikan Muhammadiyah (Sispemuh) ini adalah untuk merespons zaman dan perubahan yang terjadi secara timbal balik. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ben Anderson, sistem pendidikan merupakan hal yang mendasar dalam masyarakat kontemporer, menyediakan dasar konten pemikiran yang substantif sebagai kemestian bagi masyarakat, dan bagi masyarakat itu juga adalah untuk menjadi masyarakat yang terbayangkan di masa depan.²¹

Berdasarkan amanat mukhtar tersebut Sispemuh ini juga menegaskan ulang karakteristik dan keunggulan perguruan Muhammadiyah yang menyuratkan dan menyiratkan AIK sebagai ruh dan jiwanya. Dengan kata lain AIK sebagai konsepsi pendidikan Muhammadiyah atau fondasi filsafat pendidikan Muhammadiyah itu menjiwai dan mendasari kurikulum dan seluruh proses pembelajaran di PTM.

Dengan kata lain, desain Sispemuh ini merefleksikan latar historis didirikannya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah; visi dan ide pembaruan yang dipancarkan KH Ahmad Dahlan; dinamika perguruan Muhammadiyah dan konteks sekarang yang melingkupinya; serta orientasi ke depan di tengah perubahan dunia yang tidak mudah untuk diperkirakan. Di sisi lain, Sispemuh juga bisa memberikan gambaran dan arah berupa basis nilai dan idealisme pembaruan ke arah kemampuan untuk mendesain pendidikan yang sistemik dan paradigmatik guna pemekaran seluruh potensi warga didik dan pencapaian kemajuan dari zaman ke zaman untuk kebajikan publik sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah.

Secara historis,²² di antara latar belakang KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah berkaitan dengan gagasan pemikirannya tentang sistem pendidikan yang semestinya bagi umat Islam sesuai dengan sumber ajarannya yang memajukan. Sejak awal, bahkan sebelum mendirikan Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan sudah menaruh perhatian khusus mengenai arti penting pendidikan yang inovatif dan progresif bagi umat Islam tanpa harus kehilangan identitasnya. Dalam konteks ini A. Mukti Ali, sebagaimana dikutip di halaman awal paper ini, menyebutnya dengan ungkapan “reformasi ajaran dan pendidikan Islam”; atau menurut M. Basit Wahid, “memperbaharui sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman.”²³

Sejalan dengan pandangan tersebut dalam rumusan Sispemuh ada tiga poin penting yang mesti dipertautkan. *Pertama*, formulasi iman dan kemajuan sebagai pancang gerakan dan cita-cita yang harus diwujudkan bagi kemaslahatan hidup umat manusia. Jauh-jauh hari Kuntowijoyo sudah menggarisbawahi dua kosakata penting ini, karena bukan saja original dari pikiran KH Ahmad Dahlan tetapi juga merefleksikan kedalaman spiritualitas dan keluasan progresivitasnya. Di antara pembaharuan dalam agama dan pendidikan barangkali Muhammadiyah menempati kedudukan tersendiri karena usahanya yang keras untuk memadukan iman dan kemajuan, seperti juga Taman Siswa yang mencoba memadukan Kebudayaan Barat dan Timur dalam filsafat pendidikannya.²⁴

¹⁹PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 Tahun 2010, hlm. 116.

²⁰PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 Tahun 2015, hlm. 29.

²¹Dikutip oleh Elizabeth H. McEneaney dan John W. Meyer, “The Content of Curriculum, An Institutional Perspective” dalam Maureen T. Hallinan (Editor), 2000, *Handbook of The Sociology of Education*, Notre Dame: Springer, hlm. 189.

²²Dari perspektif sejarah sesungguhnya Muhammadiyah sudah lebih awal ikut merintis atau bahkan memelopori pendidikan yang tersistem di tanah air. Bandingkan dengan Taman Siswa di Yogyakarta (1922) dan INS Kayu Tanam di Sumatra Barat (1926).

²³M. Basit Wahid, “Sistem Pendidikan dalam Proses Perubahan Sosial” dalam Amien Rais, dkk. (Editor), 1985, *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PLP2M, hlm.13.

²⁴Kuntowijoyo, “Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah”, *Ibid.*, hlm. 37.

Formulasi iman dan kemajuan ini bila digagas lebih jauh akan menjadi prinsip dasar filsafat pendidikan Muhammadiyah dan landasan penyusunan kurikulum pendidikan Muhammadiyah untuk menghilangkan dikotomi keilmuan sebagaimana telah disinggung di depan yang menjadi problematika pertama yang mendasar. Selama ini kesan dikotomi tersebut masih kentara, misalnya dengan pemilahan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama atau dengan penempatan AIK sebagai mata kuliah semata yang disebut “ciri khas” itu.

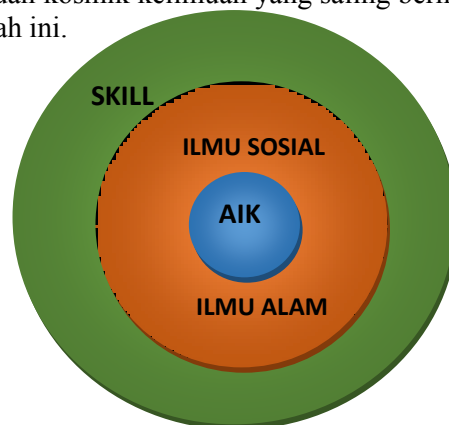
Selama ini untuk menghilangkan dikotomi tersebut dipakai istilah *integrated curriculum* (kurikulum terpadu). Kendati dikenal sebagai kurikulum terpadu namun dalam realitasnya masih menyisakan persoalan karena *integrated curriculum* menunjukkan dua entitas yang digabungkan atau disatukan dan masing-masing mempunyai perbedaan paradigma keilmuan dan ketidaksamaan karakteristik epistemologinya sehingga dua entitas tersebut tidak bisa menyatu atau menjadi satu kesatuan yang luhur dan utuh. Lihat gambar di bawah ini.



Keterangan: IU (Ilmu Umum); IA (Ilmu Agama); AI (Al-Islam); K (Kemuhammadiyahan)

Di tengah silang-sengkarut epistemologi tersebut kurikulum yang utuh padu menyeluruh layak untuk dielaborasi lebih seksama. Ide ini berangkat dari hakikat Muhammadiyah sendiri yang tidak akan bisa dipahami bila hanya sekedar sebuah organisasi saja dengan menegasikan dan menafikan jiwa Islam-nya. Pengertian yang *genuine* tentang Muhammadiyah ini pernah dirumuskan oleh Djindar Tamimy sebagai berikut, *...lahirnya Muhammadiyah dar tiada menjadi ada, didorong oleh paham almarhum K.H.A. Dahlan tentang “Apakah agama Islam itu?” Maka untuk dapat memahami Muhammadiyah yang sebenarnya harus dimulai dari memahami Islam yang sebenarnya. Sanggup menghayati Islam yang sebenarnya. Mau mengamalkan Islam yang sebenarnya dan bersemangat untuk memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Kalau orang hendak memahami Muhammadiyah akan tetapi tidak berangkat dari pemahaman yang semacam itu, maka ia hanya akan menemukan Muhammadiyah sebagai organisasi. Tidak bakal mengenal idealismenya.*²⁵

Berangkat dari pemahaman Muhammadiyah seperti itu lalu direfleksikan ke dalam kurikulum pendidikan Muhammadiyah akan menghasilkan desain kurikulum yang tidak terpisah dan fragmentaris. Kurikulum ini mencerminkan kebulatan dan keutuhan yang saling bertautan dan berjaln kelindan yang menggambarkan kesatuan kosmik keilmuan yang saling berhubungan dan terjiwai terus oleh Al-Islam.²⁶ Lihat gambar di bawah ini.



²⁵M. Djindar Tamimy, “Agama Islam Menurut Faham Muhammadiyah” dalam Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, 1990, *Muhammadiyah, Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*, Yogyakarta: Tiara Wacana dan UMM Press, hlm. 64

²⁶*Mutatis mutandis* pemikiran seperti ini sudah diterapkan oleh Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika merevisi Sistem Perkaderan Muhammadiyah (2014) dengan mengenalkan kebulat-utuhan kurikulum yang terdiri dari empat aspek: kedalaman, keluasan, keluwesan, dan kelokalan.

Dengan desain kurikulum seperti ini maka AIK menjadi centrum dan jiwa dari semua ilmu atau mata kuliah yang diajarkan di kampus PTM. Di satu sisi, dengan penataan dan perumusan ulang, AIK tetap menjadi matakuliah yang diajarkan; dan di sisi lain dengan rekonstruksi kurikulum yang melekat dalam Sispenmuh AIK-lah yang menjiwai dan mbingkainya. Lebih jauh gagasan yang menempatkan AIK sebagai ruh atau jiwa dalam Sispenmuh ini potensial akan menjadi varian baru dalam gerakan “Islamisasi ilmu” atau “ilmuisasi Islam” untuk mengakhiri dikotomi ilmu pengetahuan.²⁷

Kedua, perkaderan yang intrinsik atau built in dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Perkaderan dan pendidikan dalam satu tarikan nafas ini memiliki akar sejarah yang kuat, karena ketika KH Ahmad Dahlan merintis cikal-bakal sekolah Muhammadiyah terkandung maksud dan tujuan bukan hanya untuk mencerdaskan umat semata tetapi juga guna menyiapkan anak-anak muda terdidik sebagai kader dan generasi penerus gerakan pembaharuan yang sudah dipancangkannya itu.²⁸ Di antara keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 menyebutkan, “Memurnikan kembali fungsi Pendidikan Muhammadiyah sesuai Keputusan Sidang Tanwir Ponorogo tahun 1969, yaitu: a. Sebagai media dakwah; b. Sebagai pembibitan kader; c. Sebagai penyukuran nikmat akal.”²⁹ Tiga dasawarsa kemudian dalam Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang (2005) dan ke-46 di Yogyakarta (2010) saling keterkaitan perkaderan dan pendidikan tersebut diperkuat kembali, “Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, Kemuhammadiyah, dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah.”³⁰

Ketiga, pendidikan karakter harus kembali menjadi bagian dari keunggulan dan kekhasan sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah untuk membangun nilai-nilai utama. Dengan prinsip iman dan kemajuan serta kesadaran mengenai urgensi perkaderan dalam pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan ala Muhammadiyah di semua jenjang perguruannya, maka upaya pendidikan karakter *by design* akan dirasakan oleh warga didik dan menjadi nilai lebih ketika mereka lulus dari perguruan Muhammadiyah; religiositas, integritas, kompetensi, cakap, mandiri, dan berbudaya unggul. Tanwir Muhammadiyah 2009 di Bandar Lampung sudah menggarisbawahi kembali mengenai signifikansi pendidikan karakter ini: “Membangun kultur sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah untuk memekarkan karakter warga didik yang unggul dan berkemajuan dalam konteks kebangsaan dan keumatan”³¹.

Demikianlah kurang lebih usulan untuk perumusan Sistem Pendidikan Muhammadiyah (Sispenmuh) dalam paper ini yang sudah mendesak untuk dikerjakan. Kemendesakan dan kepentingan terhadap adanya Sispenmuh ini selain untuk menandai pancang sejarah baru pendidikan Muhammadiyah pascasatu abad, juga untuk menjadi acuan bersama penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di berbagai jenjang dan di seluruh tanah air Indonesia sehingga memudahkan untuk melakukan pemetaan dan penataannya secara kualitatif.[]

²⁷“Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Al-Qur’an dan Sunnah” sebagai keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 (2005) dan ke-46 (2010) bisa ditindaklanjuti untuk melakukan “ilmuisasi Islam.”

²⁸Interrelasi antara perkaderan dan pendidikan ini, misalnya lebih lanjut bisa dibaca pada Asep Purnama Bahtiar, 2004, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah: Wacana di Seputar Pergerakan, Kepemimpinan, dan Perkaderan*, Yogyakarta: LPPI UMY, hlm. 143-148.

²⁹Umar Hasyim, 1990, hlm. 264.

³⁰ PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 Tahun 2010, hlm.

³¹PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 06 Tahun 2009, hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti Ali, 1991, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan
- Arifin, MT, 1990, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, diterbitkan ulang oleh Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016.
- Bahtiar, Asep Purnamar, 2004, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah: Wacana di Seputar Pergerakan, Kepemimpinan, dan Perkaderan*, Yogyakarta: LPPI UMY.
- Dewantara, Ki Hajar Dewantara, 2004, *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Hallinan, Maureen T. (Editor), 2000, *Handbook of The Sociology of Education*, Notre Dame: Springer.
- Hasyim, Umar, 1990, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, dan Pendidikan*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Nurhadiantomo, Harsono, dan M. Thoyibi (Peny.), 1989, *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rais, Amien, dkk. (Editor), 1985, *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PLP2M.
- Tilaar, H.A.R., 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, 1990, *Muhammadiyah, Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*, Yogyakarta: Tiara Wacana dan UMM Press.
- PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 Tahun 2005.
-----, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 06 Tahun 2009.
-----, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 Tahun 2010.
-----, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 04 Tahun 2012.
-----, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 Tahun 2015.

<http://www.muhammadiyah.or.id>